



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

**SALINAN
RESUME RISALAH
RAPAT BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Tahun Sidang	: 2026
Masa Persidangan	: Ketiga
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Hari, Tanggal	: SELASA / 4 Agustus 2026
Waktu	: 11.00 WIB - Dibuka Pukul : 11.24 WIB - Ditutup Pukul : 12.12 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi
Pimpinan Rapat	: AHMAD MASROHAN
Notulen Rapat	: David Nur Hamzah, S.H
Acara	: Rapat Kerja Bapemperda terkait Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026
Kehadiran	: 1. Anggota Hadir : 6 Anggota 2. Anggota Izin : 2 Anggota 3. Anggota Abstain : 6 Anggota 4. Undangan : 1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Badan Pendapatan Daerah
Jalannya Rapat	:

I. PESERTA RAPAT

1. Pimpinan & Anggota Bapemperda: Sofandi (Wakil Ketua), Patemo, Zamroni, Wagianto, Yuliawan.
2. Eksekutif: Pak Aang (Kabag Hukum Setda), Pak Firman (Bapenda), Pak Henry (BKAD), Pak Ponirin & Pak Fredy (DPMD).
3. Pendamping Kegiatan dari Sekretariat DPRD: A. Karyai, S.H., M.H. beserta staf.

II. Pembukaan

Rapat dibuka oleh Ketua Bapemperda dengan agenda utama membahas perubahan

atau addendum surat masuk terkait Propemperda tahun 2026. Rapat dimajukan dari jadwal semula menjadi pukul 11.00 menjadi lebih awal karena adanya penyesuaian jadwal rapat Banggar.

III. Materi Pembahasan Utama

1. **Perubahan Kedua Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Bapenda menjelaskan beberapa alasan krusial perubahan ini, antara lain:
 - Penghapusan Pasal 14 ayat 9: Menyesuaikan dengan UU No. 1 Tahun 2022 di mana pemberian NPOPTKP untuk BPHTB tidak lagi dibatasi sekali dalam setahun, melainkan hanya berlaku satu kali saja.
 - Penyesuaian Tarif PBJT: Tarif atas jasa perhotelan untuk objek tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel/kos diusulkan turun dari 10% menjadi 5%.
 - Pajak Air Tanah (PAT): Besaran tarif diturunkan dari 10% menjadi 1,5% berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2025.
 - Retribusi Daerah: Penyesuaian tarif retribusi jasa usaha dan umum pada beberapa OPD, seperti Dinas Perikanan (TPI), Dinas Koperasi (Pasar), Dinas Pariwisata, Dishub (Reklame), dan Dinas PU CKP (pemasangan kabel).
2. **Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa**
 - DPMD mengusulkan Status Raperda ini dialihkan dari semula inisiatif legislatif menjadi usulan eksekutif karena naskah akademik (NA) dan *legal drafting* sudah diselesaikan oleh pihak eksekutif.
 - DPMD melaporkan tengah menyiapkan pembentukan desa persiapan menjadi desa induk sebanyak 8 desa untuk tahun 2027 sebagai persyaratan di tingkat kementerian, serta anggarannya sudah di usulkan ke TAPD
3. **Perkembangan Dana Abadi Daerah (DAD)**
 - BKAD melaporkan bahwa secara prinsip Kemendagri sudah memberikan rekomendasi, namun sempat terjadi kesalahan sasaran surat (ditujukan ke Gubernur, bukan membalas Kemenkeu). Saat ini surat sedang diproses untuk ditandatangani Sekjen Kemendagri guna diteruskan ke Kementerian Keuangan.
 - DPRD Banyuwangi akan berkirim surat ke Kemenkeu untuk menanyakan kepastian terkait kapasitas fiskal dan bidang sarana prasarana (Pekerjaan Umum).
 - DAD telah masuk dalam hierarki perencanaan daerah di RPJMD 2025-2029.
4. **Kesepakatan dalam Perubahan Propemperda Tahun 2026**
 - Bagian Hukum mengusulkan Dihapus dalam Propemperda Tahun 2026 yakni :
 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal ini dikarenakan Kemenkumham menyarankan penyusunan Perda baru bukan Raperda perubahan.
 - Bagian Hukum mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang "Sistem

Penyelenggaraan Pendidikan" diubah judulnya menjadi "Penyelenggaraan Pendidikan", menghapus kata "Sistem"

III. Tanggapan Bapemperda dan Sekretariat DPRD

- Ketua Bapemperda mengusulkan penambahan satu Raperda lagi untuk siap di bahas dalam tahun ini agar pembahasannya menjadi 4 Raperda, yaitu terkait Raperda Kearsipan, karena dinilai sangat penting untuk sejarah daerah
- Sofandi Susiadi: Menekankan agar Raperda yang belum siap NA-nya tidak dipaksakan masuk adendum dan sebaiknya dimasukkan ke Propemperda 2027 agar tidak menjadi beban kinerja DPRD. Terkait DAD, ia meminta agar konflik kepentingan di tingkat *stakeholder* diselesaikan terlebih dahulu agar DPRD tidak menjadi sasaran kritik publik.
- A. Karyadi, S.H., M.H., (Sekretariat DPRD): Menyarankan agar seleksi Propemperda ke depan memprioritaskan Raperda yang sudah memiliki NA dan *legal drafting* yang siap.

IV. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

1. Bapemperda menyetujui perubahan Propemperda yang mencakup penghapusan dua judul pada Propemperda tahun 2026 yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Penyelenggaraan Penanaman Modal serta perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang "Sistem Penyelenggaraan Pendidikan" diubah judulnya menjadi "Penyelenggaraan Pendidikan"
2. Bepemperda menugaskan Sekretariat DPRD untuk membuatkan Berita Acara hasil rapat hari ini untuk disampaikan kepada Banmus guna dijadwalkan dalam rapat Paripurna.
3. Sebagai informasi DPRD Akan melaksanakan *public hearing* besok 5 Agustus 2026 dengan GRIB JAYA terkait pembahasan DAD untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai regulasi-regulasi yang tengah dibahas

Banyuwangi, 4 Agustus 2026
DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Ketua

Ttd.

AHMAD MASROHAN